

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari pembahasan tersebut adalah:

1. Maksud dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengenai pasal 16 ayat (1) huruf c tentang kewajiban pelekatan sidik jari penghadap pada minuta akta adalah untuk memperkuat pembuktian mengenai pembuatan suatu akta otentik agar penghadap tidak dengan mudahnya lagi melakukan pembantahan atas kehadiran, pembuatan dan penandatanganan akta tersebut juga untuk membantah sanggahan yang dilakukan oleh penghadap yang beritikad tidak baik karena sidik jari setiap orang berbeda-beda tidak sama satu sama lain dan tidak dapat disangkal. Pada penerapannya, pelekatan sidik jari penghadap oleh Notaris memang belum seragam walaupun INI telah membuat suatu kesepakatan bahwa pengambilan sidik jari penghadap menggunakan jempol kananan dilekatkan dilembaran terpisah. Pada penerapannya tidak semua Notaris yang mengikuti kesepakatan INI, hal ini tidak menjadi masalah karena kesepakatan INI bukanlah suatu peraturan yang memaksa seperti Undang-Undang karena didalam UUJNP sendiri tidak mengatur secara rinci mengenai proses penerapan dari sidik jari tersebut.
2. Notaris yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dapat dikenai sanksi administratif dan sanksi perdata. Selain itu Notaris juga harus tunduk kepada Kode Etik Notaris, yang apabila dilanggar ada sanksi yang akan diberikan kepada Notaris. Walaupun UUJN tidak mengatur mengenai sanksi pidana

terhadap Notaris, Notaris dalam menjalankan kewajibannya dapat dikenakan sanksi pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mengenai Notaris yang tidak melekatkan lembaran sidik jari penghadap pada Minuta Akta sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, maka terhadap pelanggaran tersebut Notaris dapat terkena sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (11) UUJNP. Yaitu sanksi dengan peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat hingga pemberhentian dengan tidak hormat yang diberikan secara berjenjang apabila Notaris tersebut tidak dapat menjalankan kewajibannya. Notaris yang tidak melaksanakan kewajiban melekatkan sidik jari penghadap pada Minuta Akta tidak mengurangi keabsahan atau otentisitas dari akta yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan, karena Undang-Undang Jabatan Notaris sendiri tidak mengatur itu. Notaris yang tidak melekatkan lembaran sidik jari penghadap tidak memberi pengaruh terhadap kedudukan aktanya, akta Notaris tetap sah dan mengikat serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

B. SARAN

Saran dari pembahasan tersebut adalah:

1. Agar Notaris sebagai pejabat negara sebaiknya menjaga keprofesionalan Notaris dengan mentaati dan menjalankan kewajibannya sebagai Notaris sesuai dengan Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris. Notaris juga diharapkan tunduk pada peraturan yang dibuat oleh organisasi yaitu Kode Etik Notaris. Hal ini agar Notaris mendapatkan perlindungan hukum dari hal-hal yang dapat merugikan dan menjatuhkan Notaris.

2. Agar masyarakat yang hendak membuat akta pada Notaris dapat mengikuti prosedur yang diberikan oleh Notaris, seperti pengambilan sidik jari. Karena hal ini penting demi perlindungan hukum Notaris dan pembuktian para pihak apabila ada salah satu pihak yang menyangkal kehadirannya dalam pembuatan akta tersebut.
3. Agar Pemerintah sebaiknya segera melengkapi kembali Undang-Undang Jabatan Notaris khususnya mengenai mekanisme pelekatan sidik jari penghadap pada minuta akta Notaris supaya Notaris dalam menjalankan profesinya memiliki panduan dan pedoman yang lebih lengkap dan sempurna.

